

# Reinventing Cities as Global Players

---

Sapta Dwikardana

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, sapta@unpar.ac.id

*We live in an increasingly interconnected, interdependent world. The local and the global are intertwined. Local government cannot afford to be insular and inward-looking.*

—LOCAL GOVERNMENT DECLARATION TO THE UN WORLD SUMMIT ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT (2002)

## Apakah Kota merupakan Masalah atau Solusi?

Dimulai dari pertanyaan setiap orang: siapa yang paling bertanggung jawab terhadap penyebaran pandemik COVID-19? Semua pandangan melihat ke arah Wuhan, salah satu kota metropolitan terbesar di China. Daerah Wuhan merupakan posisi strategis titik temu antara wilayah barat dan timur di Tiongkok, dan memiliki bandara internasional yang menghubungkan kota-kota besar di berbagai belahan dunia seperti New York, London, Tokyo dan Moskow.

Setelah itu, tatapan menuju ke para pengembara antar-negara, termasuk para pelaku bisnis kaliber internasional, pelancong, seniman, ilmuwan, dan para pedagang domestik. Mereka kebanyakan adalah warga kota kelas menengah dan menengah-atas yang mempunyai kapabilitas untuk melakukan pergerakan transnasional yang tinggi. Wuhan masuk ke dalam jajaran kota terbesar ke-18 di dunia yang mengalahkan Busan, Korea Selatan. Melansir *tradecommissioner.gc.ca*, Wuhan merupakan kota di Cina Tengah yang juga paling padat penduduknya, dengan total populasi mencapai lebih dari 10,60 juta jiwa.

Saat ini, daya tarik kota, sebagai pusat perdagangan transnasional, dengan perputaran

ekonomi-bisnisnya yang begitu kuat, telah mendorong warga dunia saling berinteraksi dan terkoneksi secara masif dengan kota. Di sisi lain, kota-kota pun menyembunyikan ketidaksetaraan dimana kaum miskin terkonsentrasi di perkampungan-perkampungan dan pinggiran kota yang padat dan jorok sehingga menjadikan mereka sebagai komunitas marjinal yang memiliki kerentanan terbesar terpapar wabah virus dan penyakit lainnya, bahkan bisa jadi merupakan sumber dari penularan sebelum menyebar ke pusat kota.

Penyebaran dan dampak krisis COVID-19 memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana kompleksitas dalam hubungan Internasional yang dimulai dari kota. Virus ini muncul di Wuhan, sebagai kondisi awal dan dilacak ke pasar makanan laut yang juga merupakan kondisi awal lainnya. Kondisi awal selanjutnya yaitu perilaku di tingkat individual, ketika manusia mengonsumsi hewan yang sekaligus menjadi pengantar perpindahan virus dari hewan ke manusia.<sup>1</sup>

Tanpa perlu analisis yang mendalam, dengan sekitar 4 miliar orang saat ini adalah penduduk kota atau lebih dari separuh populasi dunia, kota telah tertuduh sebagai sumber masalah atas sebab sekaligus intensifikasi penyebaran Covid-19.

---

<sup>1</sup> Faies Jafar, Applying Complexity Theory to the Coronavirus Crisis, <https://www.e-ir.info/2020/04/18/applying-complexity-theory-to-the-coronavirus-crisis/>

## **Kota adalah bagian dari solusi.**

Kota-kota juga memainkan peran sentral dalam mempersiapkan, memitigasi dan beradaptasi dengan pandemi. Faktanya, banyak norma dan aturan bagi kota untuk mengelola penyakit menular sebelumnya sudah pernah dibahas, misalnya pada Konferensi Sanitasi Global pada tahun 1851. Saat ini, kesiapan kota bervariasi di seluruh dunia, tergantung dari tingkat perkembangan serta faktor-faktor penentu sosial-ekonomi dari populasi mereka. Kota-kota dengan konsentrasi tinggi kaum miskin dan dibarengi dengan ketidakadilan yang tinggi ternyata berpotensi lebih rentan daripada kota-kota yang memiliki sumber daya yang lebih baik, kepadatan yang rendah, serta lebih inklusif.

Faktor kuncinya adalah kota yang siap, ditandai dengan keterbukaan, transparan, kolaboratif, dianggap lebih siap untuk mengadopsi respons komprehensif di dalam mengelola pandemi, seperti pengawasan proaktif, komunikasi rutin, isolasi cepat, dan perlindungan pribadi dan komunitas (distansi fisik dan sosial). Respons awal Taiwan dan Singapura terhadap wabah COVID-19 dianggap sangat siap. Taipei dan Singapura menerapkan pelajaran dari pandemi sebelumnya dan memiliki kapasitas investigasi, sistem kesehatan dan kepemimpinan yang tepat untuk mengambil tindakan tegas. Mereka mampu melandaikan kurva pandemi melalui deteksi dini sehingga menjaga sistem kesehatan mereka agar tidak terlalu tertekan.

Dapat dipastikan, kota-kota yang memiliki tata kelola dan infrastruktur kesehatan yang baik dan kuat berada pada posisi yang lebih baik untuk mengelola pandemik dengan angka fatalitas dan mortalitas yang lebih rendah. Banyak dari tindakan yang sama ini diadopsi oleh kota Hangzhou di Cina dalam beberapa hari setelah ditemukannya virus tersebut. Demikian juga, jumlah, kualitas dan

aksesibilitas (dan kapasitas lonjakan) rumah sakit, unit perawatan internal, tempat tidur rumah sakit dan respirator dapat menentukan apakah suatu kota secara efektif mengelola pandemi, atau tidak. Jaringan kota seperti *the US Conference of Mayors* dan *National League of Cities* memahami pentingnya aspek tersebut.<sup>2</sup>

Pada akhirnya, diperlukan perangkat keras pencegahan pandemi, seperti tersedianya sistem pengawasan, penyedia layanan kesehatan dan infrastruktur kesehatan lainnya, meskipun tidak cukup meyakinkan sebagai respons yang efektif terhadap pandemi. Yang juga dibutuhkan adalah perangkat lunak seperti protokol yang dibuat dan diuji, pendidikan penyedia yang tepat, dan kolaborasi erat antara dokter yang berkualifikasi, perawat, dan lainnya dari negara hingga tingkat lokal. Dengan demikian, kurangnya tata kelola, perencanaan yang buruk dan sistem perawatan kesehatan yang terdesentralisasi di tingkat kota dapat merusak respons pandemi, bahkan menimbulkan kebingungan, ketakutan, dan biaya yang lebih tinggi.

Ketika kesiapan kota masih terbatas, yang dapat kita nilai sendiri dari berbagai sumber media, hal ini dapat mengancam usulan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Seperti di Solo Raya, kebijakan PSBB makin tak jelas ketika Bupati Karanganyar menolak, sementara Kota Solo mengaku tak punya dana yang mencukupi. Solo Raya merupakan wilayah yang mencakup Kota Surakarta (Solo) dan enam Kabupaten, yaitu Boyolali, Karanganyar, Klaten, Sragen, Sukoharjo, dan Wonogiri. Bupati Karanganyar Juliyatmono menolak rencana Pemprov Jateng menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di wilayah Soloraya. Alasan utama orang nomor satu di lingkungan Pemerintah

---

<sup>2</sup> How cities around the world are handling COVID-19 - and why we need to measure their preparedness

<https://www.weforum.org/agenda/2020/03/how-should-cities-prepare-for-coronavirus-pandemics/>

Kabupaten (Pemkab) Karanganyar itu adalah persyaratan pelaksanaan PSBB yang berat.<sup>3</sup>

### Pentingnya Kota

Dengan fakta dan angka tersebut, kita dapat meyakini pentingnya memusatkan perhatian pada Kota. Bahkan Barber, mantan Wali Kota, menyatakan "... apabila institusi politik lama, terutama negara-bangsa, tidak mampu lagi memerintah atas dunia serta gagal merespon tantangan global yang dihadapi bersama seperti perubahan iklim, mungkin waktunya bagi dunia untuk dipimpin oleh para Walikota—bersama dengan warga yang diwakilinya—untuk lebih terlibat dalam pemerintahan global"<sup>4</sup>

Untuk dapat memahami mengapa posisi kota begitu penting, pertama kita dapat membandingkan antara peran dari walikota dengan Presiden. Barber membangun premis bahwasanya walikota dan Presiden berada pada kutub yang berbeda dalam garis kontinum/spektrum politik. Untuk menjadi seorang Presiden adalah penting untuk memiliki suatu ideologi, kemampuan untuk memahami bagaimana jalannya roda birokrasi yang efektif pada skala nasional, serta harus merupakan kader dari suatu partai politik. Sementara Walikota adalah kebalikannya. Walikota adalah para pragmatis, mereka adalah *problem solver* atau *trouble shooter*, dengan tugas utama untuk membereskan masalah-masalah yang konkrit tanpa fanatisme ideologis. Hal yang membedakan lainnya, umumnya walikota adalah putra daerah yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan serta reputasi positif yang diterima langsung dari warganya. Singkatnya, walikota lebih memperoleh kepercayaan dari warganya daripada pemerintah pusat.<sup>5</sup>

Pembeda lainnya berhubungan dengan karakter dari masing-masing kota; sebab kota bersifat multi budaya, terbuka, partisipatif, demokratis, dan mampu bekerja sama. Ketika negara sedang dalam situasi berkonflik, seperti halnya China dan AS, mereka berhadapan untuk saling menyalahkan atas awal sebab dari Covid-19, kedua negara tersebut terjebak dalam emosi kebencian dan kemarahan, dan sibuk perang kata-kata untuk menunjukkan posisi yang paling benar. Sementara itu, kota-kota tidak peduli soal benar-salah, mereka saling bekerja sama secara efektif untuk mengatasi masalah secara nyata. Terbukti, pada saat yang sama, Beijing mengirimkan 1000 ventilator ke kota New York.<sup>6</sup>

Di Indonesia, kita bisa melihat kesulitannya ketika hanya mengandalkan kemampuan Pemerintah Pusat, akhirnya jumlah kasus Covid-19 bisa jadi terus meningkat, bahkan semua upaya untuk melandaikan kurva belum menunjukkan hasil yang signifikan. Pemerintah telah menetapkan anggaran sebesar Rp 110 triliun (USD 7 miliar) untuk jaring pengaman sosial bagi warga negara yang rentan terhadap dampak ekonomi. Namun, pengendalian dan pemanfaatan dana besar tersebut membutuhkan akurasi data dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk memastikan pemanfaatannya dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran. Pertanyaannya: apakah pemerintah pusat sanggup?

Solusinya ada di hadapan kita. Untuk memulainya, kita perlu memahami apa yang disebut sebagai "**smart city**" atau "Kota Cerdas".

**Kota cerdas** adalah visi pengembangan perkotaan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) beserta teknologi *Internet of Things* (IoT) dengan cara

---

<sup>3</sup> Karanganyar Menolak, Solo tak Punya Dana, PSBB Solo Raya Menggantung, <https://semarang.bisnis.com/read/20200421/535/1230714/karanganyar-menolak-solo-tak-punya-dana-psbb-solo-raya-menggantung>

<sup>4</sup> Barber (2013), *If Mayors Ruled the World: Dysfunctional Nations, Rising Cities*, Yale University Press

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Detik News, 6 April 2020

yang aman di dalam pengelolaan aset kota, termasuk sistem informasi organisasi perangkat daerah, sekolah, sistem transportasi, rumah sakit, pembangkit listrik, jaringan penyediaan air, pengelolaan limbah, penegakan hukum, dan bentuk-bentuk pelayanan publik lainnya. Tujuan utama dari Kota Cerdas adalah membangun ekosistem berbasis teknologi informasi yang dapat membuat para pejabat kota dapat berinteraksi secara langsung dengan warganya, serta memantau keadaan dan perkembangan kota untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Infrastruktur kota cerdas dibangun dengan penggunaan sensor yang terintegrasi dan sistem pemantauan *real-time*, data yang dikumpulkan dari warga dan perangkat dapat diolah dan dianalisis sehingga dapat mengatasi inefisiensi.<sup>7</sup>

Kota cerdas ditujukan dalam hal penggunaan informatika dan teknologi perkotaan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Hal ini membuat para pejabat kota dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat dan infrastruktur kota. Di sinilah teknologi kota Cerdas memainkan peran penting. Teknologi yang menggabungkan pelaporan warga dan sensor buatan (AI) akan membantu pemerintah merumuskan keputusan berbasis data untuk mengatasi pandemi berdasarkan situasi nyata di lapangan. Keputusan yang transparan, cepat dan akurat juga dapat memberikan kepastian dan ketenangan kepada masyarakat. Solusi melalui *platform smart city* akan membantu pemerintah untuk secara efektif mengurangi penyebaran COVID-19 dengan memanfaatkan data dan sensor berbasis AI sekaligus membantu memulihkan kepercayaan publik, yang telah menurun sejak kasus COVID-19 pertama terjadi di Indonesia.<sup>8</sup>

Sebagai ilustrasi, *smart city* telah memudahkan pemerintah-pemerintah daerah di China serta

*Chinese Center for Disease Control and Prevention* untuk mengidentifikasi warga yang terjangkit Covid-19, berkonsultasi via aplikasi setiap harinya, dan dilakukan *tracing* dengan teknologi yang tersedia terhadap warga yang terinfeksi.<sup>9</sup>

### ***Posisi Kota dalam Hubungan Internasional***

Terjadinya percepatan ekonomi global yang ditandai dengan mobilitas modal dan komunikasi, serta dibarengi dengan teknologi transportasi, telah menghilangkan sekat perbedaan antara urusan dalam negeri dan luar negeri. Sebagai konsekuensinya, hal tersebut telah mengubah pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan subnasional (termasuk kota). Dalam konteks ini, daerah beroperasi berdampingan dengan negara, perusahaan domestik, perusahaan multinasional, INGO, serikat pekerja, organisasi internasional, atau gerakan sosial dengan cara yang cenderung “kompleks, terfragmentasi dan tidak terstruktur”<sup>10</sup>.

Saat ini, ada lebih dari 125 jaringan dan forum multilateral yang mengumpulkan pemerintah daerah untuk membahas berbagai masalah — mulai dari pembangunan berkelanjutan hingga budaya dan pendidikan atau pembangunan perkotaan). Pertemuan global terkemuka adalah KTT Pemerintahan Regional Dunia tahunan yang telah diselenggarakan sejak 2009 oleh Regions United/Forum of Regional Governments and Global Associations of Regions (FOGAR) dan juga World Council of the United Cities and Local Governments (UCLG) diselenggarakan sejak 2010. Mereka menyatukan ribuan peserta dari pemerintah kota dan negara bagian untuk membahas tata kelola lokal dalam konteks global. Pada bulan Januari 2015, lima jaringan multilateral pemerintah lokal dan regional: International

<sup>7</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_cerdas#cite\\_note-academia.edu-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_cerdas#cite_note-academia.edu-1)

<sup>8</sup> Kurniawan, How smart-city solutions can help government battle COVID-19, <https://www.thejakartapost.com/life/2020/04/22/how-smart-city-solutions-can-help-government-battle-covid-19.html>

<sup>9</sup> Antara News, 24 April 2020

<sup>10</sup> Aldecoa, F., and M. Keating (1999). *Paradiplomacy in action: the foreign relations of subnational governments*. London and Portland, OR, F. Cass.

Association of Francophone Mayors (AIMF), Commonwealth Local Government Forum (CLGF), Council of European Municipalities and Regions (CEMR-PLATFORMA), UCLG, and UCLG Africa — menandatangani perjanjian kemitraan strategis pertama dengan Komisi Eropa yang mengakui peran pemerintah daerah sebagai pembuat keputusan untuk menetapkan kebijakan dan berkontribusi dalam mengatasi tantangan global.

### **Respons UNESCO Creative Cities Network**

*The UNESCO Creative Cities Network* (Jaringan Kota Kreatif - UCCN) memberikan peluang bagi kota-kota di seluruh dunia untuk berdiri bersama dan melakukan tindakan kolektif. Dalam hal ini, UCCN meminta semua kota anggota untuk berbagi tindakan inovatif yang telah mereka implementasikan dalam menanggapi situasi ini, terutama tindakan yang berbasis budaya dan kreativitas. Inisiatif ini bertujuan untuk memfasilitasi penyebaran informasi yang berguna dan pengetahuan kolektif untuk menginspirasi tindakan yang efektif di Kota Kreatif dan banyak lainnya di seluruh dunia. Menghadapi penyebaran global coronavirus (COVID-19), sejumlah 246 anggota Jaringan Kota Kreatif UNESCO telah dimobilisasi untuk semakin memperkuat solidaritas dan kolaborasi dalam Jaringan. Lebih dari sebelumnya, kekuatan budaya dan kreativitas harus dimanfaatkan untuk mengatasi situasi yang berkembang, dan bertujuan lebih lanjut untuk memperkuat kerja sama antar kota dan memperkuat ikatan antara masyarakat dengan masyarakat. Dan sejak diluncurkannya inisiatif ini, UCCN telah menerima banyak kontribusi berharga dari kota-kota anggota di seluruh dunia.<sup>11</sup>

Peran kota dalam praktek hubungan internasional telah menjadi keniscayaan ketika seluruh urusan luar negeri dari suatu negara

tidak lagi dapat ditangani oleh sebuah kementerian, terutama ketika harus merespons sejumlah krisis dan tantangan global yang bersifat non-militeristik dan ancaman keamanan, seperti halnya pandemik Covid-19 yang sedang mewabah secara global.

### ***Kajian Hubungan Internasional***

Meskipun sudah banyak kajian mengenai semakin pentingnya kota dan proses urbanisasi dalam transformasi global yang sedang berlangsung, serta menyambut angka dan prediksi PBB yang menyatakan lebih dari setengah orang di dunia telah menjadi penghuni kota pada tahun 2007, dan pada tahun 2050, sejumlah 70 persen dari semua orang diperkirakan tinggal di kota. Fenomena pergeseran demografis ini menuju ke arah pembentukan keseimbangan politik global baru dengan asumsi bahwa masa depan dan nasib umat manusia akan terkait dengan perkembangan kota.

Perkembangan global tersebut ternyata tidak terlalu mendapat perhatian dari komunitas akademik Hubungan Internasional, mungkin tidak lazim ketika Kota dijadikan unit analisis dalam kajiannya, yang umumnya berpusat pada negara, tetapi kepentingan dan dinamika kota selalu tak terpisahkan. Bagaimanapun, sejarah telah mencatat, kota merupakan situs utama transformasi, di mana revolusi dimulai, gaya hidup baru terbentuk, teknologi berkembang, dan dimana cara-cara baru mengorganisir cara kerja, ekonomi dan politik muncul.

Namun, Simon Curtis dalam bukunya yang terbaru *Global Cities and Global Order* telah memberikan kontribusi signifikan untuk kajian Hubungan Internasional, dengan menempatkan kebangkitan kota global dalam konteks transformasi global kontemporer. Curtis menggabungkan wawasan kota global dengan

---

<sup>11</sup>Inisiatif yang dipimpin oleh kota ini menekankan pada mobilisasi modal budaya dan kreatif dari kota dalam menangani COVID-19 melalui berbagai aspek, mulai dari pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, inklusi sosial, bantuan untuk

profesional dan seniman serta kelompok-kelompok yang kurang beruntung. Lihat <https://en.unesco.org/creative-cities/content/cities-response-covid-19>

teori hubungan internasional tentang tatanan internasional dan perubahan sistemik (*international order and systemic change*), mencoba melihat hubungan antara transformasi bentuk perkotaan (yang ditandai dengan kemunculan kota-kota global) dengan transformasi negara dan sistem internasional. Singkatnya, argumentasi yang dibawa oleh Curtis adalah "kota memainkan peran sentral dalam tatanan politik global kontemporer" dan apabila pengkaji hubungan internasional ingin sepenuhnya memahami transformasi internasional kontemporer, maka perlu mempertimbangkan kemunculan kota global sebagai aktor global. Kota-kota global tersebut akan menjadi pusat politik internasional abad kedua puluh satu, bukan hanya sebagai aktor dalam politik global, tetapi juga sebagai situs strategis yang mampu menyelesaikan berbagai tantangan yang tidak pernah berhasil diatasi oleh tatanan global sebelumnya.<sup>12</sup>

Kota global adalah kota yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi masalah global dan mengubah pandangan global. Mereka dapat melakukan ini melalui beragam sistem mulai dari politik hingga militer dan ekonomi, mengendalikan dan mengadaptasi rute yang ditempuh ekonomi global. Kota-kota yang berbeda memiliki jumlah kekuatan yang berbeda dan bagaimana kekuatan dan pengaruh ini berkembang dapat berasal dari perubahan kecil dalam geografi, iklim, bahasa, budaya dan teknologi. Peran kota-kota global berkinerja dalam ekonomi dunia yang sangat kompleks dan dapat bervariasi dari kota ke kota. Ada banyak sistem peringkat yang berbeda untuk kota-kota dunia.<sup>13</sup> Inilah sebabnya mengapa ada berbagai kelas kota-kota dunia mulai dari kota-kota yang memiliki pengaruh global yang relatif rendah hingga yang memiliki kekuatan

besar untuk mempengaruhi sistem ekonomi global<sup>14</sup>.

Curtis menyatukan seluruh argumennya melalui tiga tema utama: pertama berkaitan dengan kelompok sosial-teknis, kedua dengan dialektika kapital dan wilayah yang berkelanjutan, dan ketiga dengan tatanan internasional. Intinya, fokus pada tiga pilar, yaitu **Kota Global, Negara dan Tatanan Global**.

Maka secara eksplisit dapat dikatakan bahwa kota-kota global sekarang adalah aktor yang sangat siap dari aspek kapasitas untuk berpartisipasi secara signifikan dalam politik global termasuk dalam bidang keamanan, tata kelola iklim global, dan yang terpenting dalam mengatasi pandemik Covid-19 secara komprehensif. Beberapa gambaran dari kemampuan kota global mencakup kemampuan ekonomi generatif yang unik dari aglomerasi perkotaan, kekuatan yang timbul dari menjadi gerbang ekonomi, kemampuan untuk memimpin dan menyelenggarakan jaringan transnasional, kemampuan memanfaatkan *big data* untuk menghasilkan kota yang cerdas (*smart city*) dan berkelanjutan, serta kemungkinan otomatisasi transportasi.<sup>15</sup>

Akhirnya, negara-bangsa perlu segera menyadari potensi kota-kota global, dan mengambil langkah untuk memberdayakan mereka dalam rangka menjawab tantangan global, antara lain dengan memberikan otonomi fiskal yang lebih besar dan dukungan yang lebih kuat dalam melaksanakan peran diplomasi dalam berbagai forum internasional maupun bilateral. Sebaliknya, apabila negara gagal mengenali kenyataan baru ini, kemungkinan akan terjadi konflik besar abad kedua puluh satu antara kekuatan dan legitimasi

---

<sup>12</sup> Curtis (2016), *Global Cities and Global Order*, Oxford University Press

<sup>13</sup> Economist Intelligence Unit (2012) Hot Spots: Benchmarking global city competitiveness. London: Citigroup [Online] [Accessed on 25th April 2020] Available from: [https://www.citigroup.com/citi/citiforcities/pdfs/eiu\\_hotspots\\_2012.pdf](https://www.citigroup.com/citi/citiforcities/pdfs/eiu_hotspots_2012.pdf)

<sup>14</sup> Knox and Taylor (1995) *World cities in a world system*. Cambridge: Cambridge University Press.

<sup>15</sup> Curtis (2018), *Global Cities in the International System: A New Era of Governance*, <https://www.thechicagocouncil.org/blog/global-insight/global-cities-international-system-new-era-governance>

yang tumbuh dari kota dengan negara-bangsa yang mulai menurun kapasitasnya.<sup>16</sup>

Pemberian otonomi yang lebih besar merupakan hasil dari proses desentralisasi pemerintahan, dimana kebijakan peralihan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah nasional ke daerah, termasuk pemindahan sumberdaya, telah menjadi keniscayaan global.<sup>17</sup> Seperti yang dinyatakan oleh Michael Storper: “Wilayah kota adalah skala utama di mana orang mengalami realitas. Gejala geografis, turbulensi, dan ketidakmerataan pembangunan, dikombinasikan dengan skala urbanisasi, akan membuat pembangunan wilayah kota lebih penting dari sebelumnya — untuk ekonomi, politik, suasana global, dan kesejahteraan kita”<sup>18</sup>

Situasi ini memberikan sejumlah tantangan untuk urusan urusan luar negeri. Jika urusan internasional negara masih didominasi oleh masalah perang dan perdamaian, perdagangan, dan stabilitas moneter, maka ada potensi tekanan bagi kementerian luar negeri untuk mendiversifikasi agenda mereka dan memasukkan tema kemanusiaan seperti masalah lingkungan dan sosial, pertukaran budaya, infrastruktur, pendidikan, atau layanan kesehatan dan epidemi. Diversifikasi ke bidang-bidang isu non-militer dan non-diplomatik saat ini sudah merupakan karakteristik saling ketergantungan global. Namun, bidang-bidang tersebut umumnya berada di bawah kompetensi pemerintah daerah (kota atau provinsi).<sup>19</sup>

Jika kebijakan luar negeri nasional memandang ke lingkungan eksternal, maka kebijakan luar negeri subnasional lebih melihat ke dalam ke basis domestik.<sup>20</sup> “Kerjasama Internasional yang di-desentralisasi” merupakan inovasi

kerjasama non-negara yang diperkenalkan oleh perjanjian yang ditandatangani antara Uni Eropa dan negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik selama Konvensi Lomé Keempat tahun 1989.<sup>21</sup> Terkait hal yang sama, UNDP juga menggunakan istilah serta memberi pengertian sebagai “kemitraan jangka panjang antara masyarakat di berbagai kota dan sebagai mekanisme untuk membangun modalitas 'kemitraan' baru, yang berfokus pada hubungan langsung antar wilayah regional, yang berbeda dengan model kerja sama bilateral di tingkat nasional” (PBB 2008, 2). Istilah ini dipakai bersama oleh badan-badan internasional lainnya seperti *the Euro-African Partnership for Decentralized Governance* yang mendapatkan dukungan dari *the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN-DESA)*.

Banyak alternatif telah diusulkan untuk menjelaskan fenomena yang sama, seperti “*subnational foreign affairs*,” “*subnational foreign policy*,” “*substate diplomacy*,” “*multilayered diplomacy*,” “*constituent diplomacy*,” “*local government external action*,” “*local diplomacy*,” “*local foreign policy*,” “*regional diplomacy*,” “*plurinational diplomacy*,” “*post-diplomacy*,” “*micro-diplomacy*,” atau ada yang menyebutkannya sebagai “*foreign policy localization*”.

## Penutup

Ketika teori-teori dalam disiplin hubungan internasional ditantang untuk dapat memberikan solusi kebijakan yang efektif, maka paparan kritis ini diharapkan dapat memberikan peluang. Kita dapat menempatkan kota, terutama kota global dan kota cerdas berkelanjutan, sebagai unit analisis bersama-sama dengan negara di dalam konteks yang

<sup>16</sup> *ibid*

<sup>17</sup> Falletti, Tulia G. 2010. *Decentralization and Subnational Politics in Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press.

<sup>18</sup> Storper, Michael. 2013. *Keys to the City: How Economics, Institutions, Social Interactions, and Politics Shape Development*. Princeton: Princeton University Press.

<sup>19</sup> Rodrigo Tavares (2016), *Paradiplomacy, Cities and States as Global Players*, Oxford University Press

<sup>20</sup> Hocking, Brian. 1993. *Localizing Foreign Policy: Non-Central Governments and Multilayered Diplomacy*. London and New York: Macmillan and St. Martin's Press.

<sup>21</sup> *Ibid* (2016)

lebih sistemik dan komprehensif untuk dapat memahami implikasi dari pertumbuhan dan dinamika kota global sebagai konsekuensi dari urbanisasi dan transformasi global. Dalam konteks pandemi Covid-19, strategi membangun ketahanan kota melalui jejaring kota-kota dari berbagai negara untuk melakukan pertukaran dan menghasilkan contoh-contoh praktik bagaimana kota dengan tantangan urbanisasi yang pesat, serta dengan kondisi penduduk di tingkat pendapatan menengah ke bawah, mampu membangun kota yang berketahanan terhadap berbagai dampak, terutama saat ini dari pandemi Covid-19.

Mengembalikan peran kota sebagai pemain global akan menjadi solusi penting dalam menghadapi tantangan di abad 21 yang tidak

pernah bisa terprediksi. Kehadiran kota global dan kota cerdas bersama aktor non-negara lainnya untuk berperan pada isu-isu global, akan mampu meningkatkan ketahanan sekaligus meningkatkan daya saing suatu negara-bangsa. Sebaliknya, apabila negara gagal mengenali kenyataan baru ini, kemungkinan akan terjadi konflik besar abad ke-21 antara kekuatan dan legitimasi yang tumbuh dari kota dengan negara-bangsa yang mulai menurun kapasitasnya.

*The 19<sup>th</sup> century was a century of empires,  
the 20<sup>th</sup> century was a century of nation states  
The 21<sup>st</sup> century will be a century of cities*  
-Wellington E. Web, mantan Walikota Denver